

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Di antara pemilih, keputusan dibuat oleh politisi. Pada pemilihan berikutnya, warga negara dapat mengganti wakil yang mereka pilih sebelumnya. Kemampuan untuk memilih inilah yang disebut sebagai demokrasi (Sorensen, 2003, p. 14).

Demokrasi ditandai oleh adanya tiga prasyarat: (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan, (2) partisipasi masyarakat, dan (3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik. Dalam hal ini, sistem pemilu (*electoral system*) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting di dalam negara demokrasi untuk mewujudkan tiga prasyarat demikian. Melalui sistem ini, kompetisi, partisipasi, dan jaminan hak-hak politik bisa dilihat (Marijan, 2010, p. 83).

Landasan hukum pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara langsung Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota diatur dalam konstitusi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pasal ini merupakan hasil tuntutan reformasi yang

diformulasikan dalam perubahan (Amandemen) UUD 1945 kedua, yang menyatakan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. Dipilih secara demokratis artinya dipilih langsung oleh rakyat, satu orang satu suara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dan yang sekarang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Setyawan & Adiwijaja, 2013).

Tujuan dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah untuk memberikan kedaulatan dalam bidang politik bagi masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat di daerah untuk berkontribusi positif bagi kemajuan daerahnya sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Pilkada langsung berkaitan dengan kedaulatan rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut (Priatmoko, 2005, pp. 128-130):

1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak pilihnya secara utuh menjadi kewajiban Negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah hak memilih calon pemimpin.

2. Wujud nyata asas pertanggung jawaban dan akuntabilitas. Pertanggung jawaban dan akuntabilitas publik seseorang pemimpin merupakan landasan yang amat penting guna menjawab kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung maka seseorang kepala daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerima rakyat kepada kepala daerah merupakan menjamin bagi peningkatan partisipasi politik yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan.
3. Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinergi antar pemerintah dengan rakyat. Pemerintah akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan kesinambungan hubungan antar keduanya akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintah yang demokrasi.

Semakin tinggi partisipasi politik mengindikasikan bahwa masyarakat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan pemilihan umum. Sebaliknya bila tingkat partisipasi rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa masyarakat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan pemilihan umum. Rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat direfleksikan dengan tidak menggunakan hak pilihnya di dalam pemilihan umum.

Tepat pada tanggal 15 Februari 2017 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua diselenggarakan. Pilkada diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Daerah yang akan

menyelenggarakan pilkada tersebut terdiri atas 7 provinsi, 76 kabupaten, 18 kota. Salah satunya daerah kota Yogyakarta. Tingkat partisipasi masyarakat pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yogyakarta mencapai 71% lebih baik jika dibandingkan pada tingkat partisipasi pada pilkada periode sebelumnya sebanyak 64,5%. Dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) 298.989 dan 8.536 diantaranya terdiri dari golongan pemilih pemula yang tersebar di 14 Kecamatan yang terdiri dari:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilih Pemula Tingkat Kecamatan

| NO. | Nama Kecamatan | jumlah |
|--------------|-----------------------|---------------|
| 1 | Danurejan | 471 |
| 2 | Gedongtengen | 433 |
| 3 | Gondokusuman | 882 |
| 4 | Gondomanan | 314 |
| 5 | Jetis | 545 |
| 6 | Kotagede | 660 |
| 7 | Kraton | 511 |
| 8 | Mantrijeron | 725 |
| 9 | Mergangsan | 669 |
| 10 | Ngampilan | 365 |
| 11 | Pakualaman | 238 |
| 12 | Tegalrejo | 746 |
| 13 | Umbulharjo | 1.422 |
| 14 | Wirobrajan | 555 |
| Total | | 8.536 |

Sumber: diolah oleh penulis dari data rekapitulasi DPT pemilih pemula 2017

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa kecamatan Umbulharjo memiliki jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih pemula

tertinggi yaitu sebanyak 1.422. Di Kecamatan Umbulharjo terdapat 7 Desa/Kelurahan diantaranya yaitu:

Tabel 1.2

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilih Pemula ditingkat Desa/Kelurahan Kecamatan Umbulharjo

| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah |
|--------------|---------------------|--------------|
| 1 | Giwangan | 149 |
| 2 | Mujamuju | 237 |
| 3 | Pandeyan | 230 |
| 4 | Semaki | 97 |
| 5 | Sorosutan | 326 |
| 6 | Tahunan | 183 |
| 7 | Warungboto | 200 |
| Total | | 1.422 |

Sumber: diolah oleh penulis dari data rekapitulasi DPT pemilih pemula 2017

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa Desa/Kelurahan Sorosutan memiliki jumlah daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih pemula tertinggi jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya yaitu sebanyak 326. Pemilih pemula sangat mearik untuk dikaji. Karena pemilih pemula merupakan suatu subjek dalam kegiatan politik. Termasuk kegiatan politik seperti pemilihan umum.

Dengan keterbatasan pengetahuan dan jangkauan politik, pemilih pemula masih memerlukan pembinaan untuk pengembangan peran mereka dalam bidang politik sehingga pemilih pemula dapat berpartisipasi dalam politik, termasuk dalam kegiatan pemilu agar pemilih pemula menggunakan hak pilihnya. Selain itu, keterbatasan pemilih pemula dalam pengetahuan dan pengalaman membuat pemilih pemula sering dimanfaatkan oleh seseorang atau kelompok yang berkepentingan tertentu (Usman, 2015, p. 5).

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai partisipasi politik pemilih pemula. Untuk itu penulis menetapkan judul *“Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2017 (Studi Kasus Di Kelurahan Sorosutan)”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1.2.1 Bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sorosutan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017?

1.2.2 Agen-agen sosialisasi politik apa saja yang berperan terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sorosutan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta tahun 2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sorosutan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017

1.3.2 Untuk mengetahui agen-agen sosialisasi politik apa saja yang berperan terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sorosutan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta tahun 2017

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi/ literatur yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang menggeluti bidang kajian Ilmu Pemerintahan khususnya tentang partisipasi politik masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi KPU Kabupaten/Kota Yogyakarta

Data yang telah didapatkan dalam penelitian ini mengenai partisipasi politik masyarakat dapat menjadi masukan bagi KPU Kabupaten/Kota Yogyakarta dan dapat menyusun langkah-langkah untuk mempermudah sosialisasi dan upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

b. Bagi partai politik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi partai politik sebagai partai pendukung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memahami partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam melakukan kajian lebih lanjut terhadap topik serupa di masa mendatang, sebab masih banyak aspek yang belum dikaji dalam penelitian ini seiring berjalannya waktu demokrasi dan perilaku politik warga negara.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Partisipasi Politik

Menurut Surbakti (Qodir, 2016, p. 37) partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (dan partisipasi) orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga masyarakat maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Partisipasi politik menurut Rush dan Althoff (Qodir, 2016, p. 38) adalah keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Sedangkan menurut Budiardjo (Qodir, 2016, p. 38)

partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

a. faktor yang mempengaruhi partisipasi politik

Secara umum partisipasi politik individu maupun kelompok dalam sistem politik ditentukan oleh (Subakti, 2006, p. 126) :

1) Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi perilaku politik dan bentuk partisipasi politik seseorang, dalam penelitian yang dilakukan oleh Lipset di Amerika Serikat menemukan bahwa individu yang pendidikannya lebih tinggi lebih banyak berpartisipasi daripada individu yang pendidikannya lebih rendah.

Selain tinggi rendahnya pendidikan yang dimiliki seseorang individu, tingkat partisipasi juga dapat dipengaruhi oleh bidang studi atau jurusan. Artinya individu yang menggeluti bidang studi yang mempunyai ketertarikan dengan politik atau bidang ilmu sosial cenderung lebih tertarik dalam proses partisipasi politik dibanding dengan individu yang menggeluti bidang studi yang tidak mempunyai ketertarikan dengan politik seperti ilmu pengetahuan alam.

2) Jenis Kelamin dan Status Sosial

Jenis kelamin dan status sosial juga merupakan pengaruh dominan individu untuk berpartisipasi dalam politik, Karl W Deutsch menyimpulkan bahwa di Amerika 1/3 dari kelompok warga negara yang paling tinggi status dan pendapatannya mengadakan partisipasi 6 kali lebih banyak daripada 1/3 kelompok warga yang paling rendah status dan pendapatannya, selanjutnya Lipsel menemukan bahwa di AS pria lebih banyak berpartisipasi dalam *votting* dibandingkan dengan wanita.

3) Sumber Informasi

Sumber informasi (tokoh masyarakat, tetangga, media masa, partai politik dan teman) mempunyai hubungan yang menghasilkan pengaruh dengan partisipasi politik masyarakat termasuk pemilih pemula. Adanya kecenderungan bahwa semakin terpercaya sumber-sumber informasi yang diakses pemilih, maka semakin tinggi (kuat) pula pengaruh sumber-sumber informasi bersangkutan terhadap partisipasi politik mereka. Sebaliknya, adanya kecenderungan bahwa semakin kurang/ tidak terpercaya sumber-sumber informasinya yang diakses pemilih, maka semakin rendah pula pengaruh sumber-sumber informasi bersangkutan terhadap partisipasi politik mereka.

4) Kesadaran Politik

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik.

Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

5) Lingkungan

Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta lembaga prantaranya. Faktor lingkungan dalam lingkungan mahasiswa dapat mencakup keluarga dan teman bergaul. Keluarga merupakan lembaga yang pertama kalinya dijumpai oleh seorang individu.

Watak dan sikap individu dibentuk pertama kali di dalam keluarga sehingga dapat mempengaruhi dan menentukan pandangan-pandangan individu dalam politik. Sedangkan teman bergaul juga dapat menentukan sikap-sikap politik individu. Seorang individu akan tertarik kepada masalah-masalah politik apabila teman-teman di dalam kelompok tertarik kepada masalah-masalah politik. Dalam hal ini, individu merubah kepentingannya dan tingkah lakunya agar dapat sesuai dengan kelompoknya dimana dia berada. Hal ini juga sebagai usaha agar individu dapat diterima oleh anggota lainnya di dalam kelompoknya.

6) Ideologi (pengaruh partai politik serta kelompok kepentingan dalam sosialisasi politik dan komunikasi politik)

Ideologi yang ditanamkan partai politik kepada konstituennya juga sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat. Di negara komunis pada umumnya partisipasi politik warga negara diatur dan dikembangkan oleh partai komunis, organisasi pemuda, kebudayaan dan buruh yang diatur dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendukung usaha perubahan masyarakat kearah terciptanya masyarakat komunis. Sosialisasi dan komunikasi politik yang telah diatur dan dapat dikendalikan tersebut sehingga kuantitas partisipasi politik warga Uni Sovyet dan negara komunis pada umumnya lebih tinggi walaupun secara kualitas partisipasi itu lebih bermakna kepada mobilitas atau dipaksakan. Karl W Deutsch membandingkan partisipasi politik individu dalam pemilihan presiden di Uni Sovyet dan AS pada tahun 1968. Hasilnya menunjukkan bahwa persentase partisipasi di Uni Sovyet jauh lebih tinggi (96%) dibandingkan dengan AS (62%).

Sedangkan menurut (Budiardjo, 2008, pp. 378-379), terdapat empat faktor yang memengaruhi partisipasi politik yaitu:

1) Faktor sosial ekonomi

Kondisi sosial ekonomi meliputi pendapatan, tingkat pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, status, dan organisasi.

2) Faktor politik

Peran serta politik masyarakat didasarkan pada politik untuk menentukan suatu produk akhir. Faktor politik meliputi:

a. *Komunikasi politik.*

Komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang mempunyai konsekuensi politik baik secara aktual maupun potensial, yang mengatur kelakuan manusia dalam keberadaan suatu konflik. Komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat sebagai interaksi antara dua pihak yang menerapkan etika.

b. *Kesadaran politik.*

Kesadaran politik menyangkut pengetahuan, minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Tingkat kesadaran politik diartikan sebagai tanda bahwa warga masyarakat menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan dan atau pembangunan.

c. *Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan.*

Pengetahuan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan akan menentukan corak dan arah suatu keputusan yang akan diambil.

d. *Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik.*

Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik yakni masyarakat menguasai kebijakan publik dan memiliki kewenangan untuk mengelola suatu obyek kebijakan tertentu. Kontrol untuk mencegah dan mengeliminir penyalahgunaan kewenangan dalam suatu keputusan politik, kontrol masyarakat dalam kebijakan publik the power of directing. Juga mengemukakan ekspresi politik, memberikan aspirasi atau masukan (ide, gagasan) tanpa

intimidasi yang merupakan problem dan harapan rakyat, untuk meningkatkan kesadaran kritis dan keterampilan masyarakat terhadap persoalan aktual dan merumuskan agenda tuntutan mengenai pembangunan.

3) Faktor fisik individu dan lingkungan

Faktor fisik individu sebagai sumber kehidupan termasuk fasilitas serta ketersediaan pelayanan umum. Faktor lingkungan adalah kesatuan ruang dan semua benda daya, keadaan, kondisi dan makhluk hidup, yang berlangsungnya berbagai kegiatan interaksi sosial antaran berbagai kelompok beserta lembaga dan pranatanya.

4) Faktor nilai budaya

Nilai budaya politik atau civic culture merupakan basis yang membentuk demokrasi, hakekatnya adalah politik baik etika politik maupun teknik atau peradaban masyarakat. Faktor nilai budaya menyangkut persepsi, pengetahuan, sikap, dan kepercayaan politik.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai negara dapat dibedakan menjadi kegiatan politik dalam bentuk konvensional dan nonkonvensional, bentuk partisipasi politik menurut Gabriel Almond dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bentuk konvensional dan bentuk non konvensional (Almond, 2010: 186).

1) *Bentuk konvensional*

Bentuk konvensional antara lain:

- a. *Dengan memberikan suara (voting)*
- b. *Dengan diskusi kelompok*
- c. *Dengan kegiatan kampanye*
- d. *Dengan membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan*
- e. *Dengan komunikasi individual dengan pejabat politik/administratif*
- f. *Dengan pengajuan petisi*

2) *Bentuk nonkonvensional*

Bentuk nonkonvensional antara lain:

- a. *Dengan berdemonstrasi*
- b. *Dengan konfrontasi*
- c. *Dengan pemogokan*
- d. *Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda, perusakan, pemboman dan pembakaran*
- e. *Tindakan kekerasan politik manusia pengecualian/pembunuhan*
- f. *Dengan perang gerilya/revolusi*

Menurut Samuel P. Huntington dan Joam M. Nelson (dalam Yuliandri, 2007:75-76) partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut:

1) *Electoral activity*

Segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum. Termaksud dalam

kegiatan ini antara lain yakni memberikan sumbangan untuk sebuah partai, menjadi sukarelawan dalam kegiatan kampanye sebuah partai politik, mengajak seseorang untuk mendukung atau memilih dalam sebuah partai politik atas nama partai, memberikan suara dalam pemilihan umum, mengawasi pelaksanaan pemberian dan penghitungan suara, menilai calon-calon yang diajukan dan visi dan misi yang disampaikan.

2) *Lobbying*

Tindakan seseorang atau kelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau tokoh politik dengan tujuan untuk memengaruhi pejabat atau tokoh politik tersebut menyangkut masalah-masalah tertentu yang memengaruhi kehidupan mereka.

3) *Organizational activity*

Keterlibatan warga negara ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik baik sebagai pemimpin, pengurus, atau anggota biasa. Organisasi ini mempunyai fungsi memengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik, misalnya organisasi yang spesifik menangani masalah hukum dan hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau keagamaan.

4) *Contacting*

Yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara negara secara langsung (dengan mendatangi ke tempat bertugas, menghubungi

lewattelepon) terhadap pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh politik baik dilakukan secara individual atau sekelompok orang yang jumlahnya sangat kecil.

5) *Violence*

Partisipasi politik yang berupa tindakan dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah.

Sedangkan menurut (Qodir, 2016, pp. 45-46) partisipasi politik warga negara dapat dikategorikan dalam bentuk sebagai berikut

1) Kegiatan Pemilihan

Mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam pemungutan suara adalah jauh luas dibandingkan dengan partisipasi politik lainnya. Walaupun demikian, pemilihan adalah salah satu bagian dari bentuk partisipasi, jadi tidak bisa dikatakan bahwa jika partisipasi masyarakat dalam pemilihan atau pemungutan suara meningkat berarti bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya juga meningkat demikian juga sebaliknya.

2) Lobbying

Mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

Contoh yang jelas adalah kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap, suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu. Lobby politik sering dilakukan untuk memuluskan keputusan politik oleh para politisi di parlemen sehingga menjadi bagian dari aktivitas politik aktif. Namun demikian, sering kali lobby politik hanya berjalan ketika kebijakan politik tersebut sesuai dengan kehendak partai politiknya. Jika sesuai akan diloby agar segera diputuskan sementara jika tidak sesuai diloby agar tidak jadi diputuskan karena dianggap merugikan.

3) Kegiatan Organisasi

Tujuan utama dan eksplisinya adalah mengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi ini dapat memutuskan usahanya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau pada masalah umum yang beraneka ragam. Menjadi anggota organisasi sudah merupakan bentuk partisipasi politik, tidak peduli apakah orang yang bersangkutan ikut atau tidak didalam upaya organisasi untuk memengaruhi keputusan pemerintah. Keanggotaan yang tidak aktif dapat dianggap sebagai partisipasi melalui orang lain. Organisasi politik jelas memberikan dukungan langsung pada praktik politik, namun ada juga organisasi non politik yang melakukan aksi dukungan pada partai politik.

4) Mencari Koneksi (*contacting*)

Merupakan tindakan perorangan yang ditunjukkan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang. Bagaimana seseorang mencari koneksi untuk berpolitik sering dilakukan oleh para politisi dan simpatisan politik sehingga muncullah kebiasaan orang politik patronase ataupun *patront* dan *client* politik dalam masyarakat politik. Hanya ini pula yang sering menumbuhkan politik korupsi, kolusi dan nepotisme politik (KKN politik). Di Indonesia praktik KKN politik pernah berjalan dengan sempurna era orde baru dan agaknya sampai sekarang ini.

5) Tindak Kekerasan (*violence*)

Upaya untuk mengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda. Inilah politik kekerasan yang mengarah pada premanisme politik sepanjang sejarahnya di Indonesia. Kekerasan politik pada akhirnya menimbulkan premanisme dan balas dendam politik.

Dengan demikian, partisipasi dapat dipahami sebagai prinsip, proses maupun ruang. Partisipasi bisa menjadi sebuah prinsip dan nilai dasar yang menjadi sangat dalam seluruh proses kebijakan. Namun partisipasi juga bisa merupakan rangkaian proses kebijakan yang efektif, efisien, dan pro publik dengan cara meningkatkan kualitas interaksi yang

bersifat dua arah dan saling menguntungkan antara pemerintah dan warganya (Qodir, 2016, pp. 45-46).

Partisipasi politik merupakan proses dimana anggota masyarakat mampu membagi pandangan mereka dan menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan dan berbagai aktivitas perencanaan; kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk dapat memengaruhi keputusan-keputusan pemerintah. Melalui proses ini berbagai pihak yang berkepentingan berusaha memengaruhi pemegang kewenangan dan kontrol di saat merumuskan inisiatif-inisiatif pembangunan, ketika mengambil keputusan-keputusan dan menentukan sumber daya yang nantinya bisa memengaruhi mereka.

a. Pilkada Serentak

Pilkada serentak adalah proses pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten dan Kota dalam lingkup wilayah atau kawasan tertentu dilakukan secara serentak/dalam waktu yang bersamaan. Selama kurun waktu 10 tahun kebelakang di Indonesia telah terjadi banyak perubahan dalam sistem pemilihan, hal tersebut dimaksudkan untuk melahirkan tata cara dan pelaksanaan pemilu yang lebih efisien. Sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih sendiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan hal ini berubah sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dimana dikatakan bahwa kepala daerah wakil kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Bila merujuk kepada UU No.32 Tahun 2004 maka peserta pilkada adalah pasangan yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun ketentuan ini berubah dengan terbitnya UU No.12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa saja dari pasangan calon perseorangan yang hanya didukung oleh sekelompok orang lalu pada tahun 2015 pemerintah pusat menyepakati diadakannya pilkada serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan pemerintahannya akan berakhir ditahun 2015. (Agustino, 2015, p. 2).

1.5.2 Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Rush & Althoff, 2007, p. 25).

Efriza (Bakti, Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi, 2012, p. 17) mengungkapkan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari suatu proses sosial. Sosialisasi adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan

yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah.

Menurut Rush (2007, p. 35) bahwa agen sosialisasi politik terdiri dari keluarga, pendidikan, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama, kelompok-kelompok senggang, dan media massa. Proses sosialisasi melalui berbagai tahap sejak masa kanak-kanak sampai tingkat yang paling tinggi dalam usia dewasa. Hal ini berlangsung dalam proses yang berkesinambungan sepanjang hidup.

Agen-agen sosialisasi politik menurut Efriza dalam (Bakti, 2012, p. 23) terdiri dari 6 jenis, yaitu keluarga, sekolah, kelompok teman sebaya, media massa, situs jejaring sosial, dan kontak-kontak politik langsung. Jika diasumsikan usia pemilih pemula yaitu 17-21 tahun maka status pemilih pemula juga bisa terdiri dari 24 mahasiswa ataupun pekerja muda sehingga agen sosialisasinya termasuk kampus atau tempat kerja. Berikut ini adalah penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi politik serta pendapat para ahli yang menjelaskannya:

a. Keluarga

Fase awal pembelajaran seorang anak dalam keluarga juga dapat terjadi saat proses belajar dalam keluarga sebelum anak sadar mengenai politik.

Keluarga mempunyai peranan yang menentukan dalam proses sosialisasi nilai politik terhadap warga negara ataupun individu karena

keluarga mempunyai kesempatan untuk menurunkan nilai-nilai politiknya kepada seseorang individu justru pada saat masa kanak-kanak (Bakti, 2012, p. 23)

Selain itu, ada asumsi lain yang menyatakan bahwa sosialisasi politik yang diperoleh seorang anak dapat terjadi karena hal yang tidak disengaja.

b. Sekolah

Menurut Efriza (Bakti, 2012, p. 23), pendidikan telah dipandang sebagai satu variabel penting dalam kegiatan menjelaskan tingkah laku politik, dan terdapat banyak pembuktian tidak langsung yang menyatakan pendidikan itu penting sebagai agen sosialisasi politik. Hal ini dapat dipahami karena di sekolah anak-anak di didik di dalam suatu proses yang sangat teratur, sistematis, dan nilai-nilai politik bisa diturunkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh guru-guru kepada anak didik.

Sekolah memberikan pengertian kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkret tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik.

c. Tempat kerja

Faktor penting yang menentukan adalah kesempatan berpartisipasi dalam keputusan di tempat kerja seseorang.

Selanjutnya Sahid (2010: 203) menjelaskan bahwa pekerjaan dan organisasi-organisasi formal maupun informal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh dan semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas.

d. Kelompok teman sebaya

Pada prosesnya, ketika anak-anak itu muncul dari pengaruh awal keluarganya masuk ke dalam dunia yang lebih besar dari sekolah dan kelompok-kelompok sebaya, maka mereka terkena pengaruh-pengaruh lain yang dapat memperkokoh atau justru bertentangan dengan politisasi awalnya (Rush & Althoff, 2007, p. 71).

Kelompok teman sebaya merupakan suatu kelompok dari orang-orang yang seusia dan memiliki status yang sama dalam mengembangkan sikap dan perilaku, dengan siapa seseorang umumnya berhubungan atau bergaul. Sosialisasi politik melalui kelompok teman sebaya bersifat informal dan langsung (Bakti, 2012, p. 36).

e. Media massa

Diketahui bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, dan majalah memegang peranan penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai kepada bangsa-bangsa mereka, termasuk sikap dan nilai politik (Sahid, 2010: 202).

Efriza (Bakti, 2012, p. 38) menjelaskan bahwa: “Di dalam suatu masyarakat yang sifatnya terkungkung atau dimana rezim

berkuasa secara totaliter, dengan sendirinya, tidak banyak nilai-nilai politik yang bisa diturunkan. Tetapi dalam suatu masyarakat yang demokratis, nilai-nilai politik yang dikandung media massa sangat bervariasi. Media massa dalam hal ini, baik media cetak seperti surat kabar dan majalah maupun media elektronik seperti radio, televisi, dan media online, semakin memegang peranan penting dalam mempengaruhi cara pandang, cara pikir, cara tindak, dan sikap politik seseorang”.

f. Kontak-kontak politik langsung

Kontak-kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik dan kehidupan politik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok-kelompok untuk tetap setia atau tidak, bersedia mendukung atau tidak sistem politik, pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya (Sahid, 2010: 202).

Organisasi-organisasi ataupun lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya mempunyai peranan pula menyalurkan nilai-nilai politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa melalui berperannya pola aliran politik dalam organisasi-organisasi maka secara langsung anggota-anggota suatu organisasi kemasyarakatan terlibat atau mempunyai kesempatan yang sama besar untuk menurunkan atau menyebarkan nilai-nilai politik kedalam organisasi tersebut maupun kepada anggota masyarakat yang bukan anggota dari organisasi-organisasi tersebut (Bakti, 2012, p. 48).

Berdasarkan penjelasan mengenai agen-agen sosialisasi di atas, maka yang dimaksud dengan agen sosialisasi dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu mengenai pemilih pemula adalah agen-agen sosialisasi yang terdiri dari keluarga, sekolah/kampus/tempat kerja, teman, media massa baik cetak maupun elektronik serta situs jejaring sosial, dan kontak-kontak politik langsung

1.5.3 Pemilih Pemula

Menurut pasal 1 ayat (22) UU No 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat (1 dan 2) UU No. 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilih pemula merupakan pemilih yang berusia antara 17-21 tahun atau baru pertama kali ikut dalam pemilu (Maesur zaky, 2009: 14) Kemudian menurut Suhartono (2009:6) pemilih pemula mempunyai kebudayaan yang santai, bebas, dan cenderung pada hal-hal informal mencari kesenangan. Oleh sebab itu semua hal yang tidak menyenangkan baginya akan dihindari.

Pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kalinya sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun (Saputra, 2017, p. 3). Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, Pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik (Saputra, 2017).

Sehingga partisipasi politik oleh pemilih pemula ini merupakan suatu proses untuk menjadi dewasa dan siap meninggalkan usia remajanya dikala mereka sudah diberikan hak sebagaimana hak orang dewasa walaupun hak tersebut baru pertama kalinya mereka peroleh.

Sehingga dengan diberikannya hak sebagaimana hak orang dewasa pada usia akhir remaja (penghujung usia remaja) maka remaja tersebut dapat menjelaskan siapa dirinya, apa perannya dalam masyarakat, apakah nantinya ia akan berhasil atau gagal yang pada akhirnya menuntut untuk melakukan penyesuaian mental dan menentukan peran, sikap, nilai serta minat yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Ramlan (1999: 41) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam kehidupan politik di suatu negara adalah :

a. Kesadaran Politik

Merupakan suatu sikap penghayatan atau pemilikan seseorang terhadap nilai-nilai sebagai warga negara dalam menunaikan hak dan kewajibannya untuk menunjang dan berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

b. Kepercayaan terhadap pemerintah

Merupakan suatu sikap seseorang untuk mempercayai pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang diwakili oleh pejabat-pejabat pemerintah khususnya jabatan politik.

c. Keikutsertaan dalam kehidupan politik

Merupakan suatu sikap mensukseskan kehidupan politik melalui kegiatan-kegiatan politik serta program-program pemerintah yang diselenggarakan untuk menunjang dan memberikan pengetahuan politik/pendidikan politik kepada masyarakat.

1.6 Definisi konseptual

Adapun definisi Konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu

dengan melibatkan diri dalam segala tahapan di pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017.

1.6.2 Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali dalam pemilukada Kota Yogyakarta tahun 2017 dengan rentang usia 17-21 tahun.

1.6.3 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah adalah proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung di tingkat Kota Yogyakarta tahun 2017.

1.7 Definisi Operasional

Definisi Operasional dari penelitian ini untuk mengukur partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Yogyakarta tahun 2017, antara lain:

1. Bentuk partisipasi politik
 - a. Tahap Pra Pemilihan
 - 1) Partisipasi dalam sosialisasi pemilukada
 - 2) Mengetahui para calon walikota dan wakil walikota
 - 3) Mengetahui program para calon walikota dan wakil walikota
 - 4) Mengetahui visi dan misi para calon walikota dan wakil walikota

- 5) Mengetahui kegiatan kampanye para calon walikota dan wakil walikota
- b. Tahap Pemilihan
 - 1) Memberikan suara dalam pemilihan
 - 2) Kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilihan
 - c. Pasca Pemilihan

Mengetahui kegiatan perhitungan suara dalam pemilukada
2. Agen-agen sosialisasi politik yang berperan terhadap partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sorosutan dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Yogyakarta Tahun 2017 menurut (Bakti, 2012, p. 23) , yaitu:
 - 1) Keluarga
 - 2) Media Masa
 - 3) Teman
 - 4) Sekolah

1.8 METODE PENELITIAN

“Metodologi penelitian” berasal dari kata “ Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu: Logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan (Narbuko & Ahmadi, 2015, p. 1).

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan penelitian sebagai instrument kunci (Tanjung & Ardial, 2005, p. 3)

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori dan konsep (Tanjung & Ardial, 2005, p. 3).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

1.8.3 Jenis Data

Menurut (Lexy, 2007) data adalah segala keterangan atau informasi segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sumber data adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan hal lainnya. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder sebagai pendukung. Penjelasan data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh pihak pertama yang sifatnya sangat subjektif, karena belum diolah. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan masyarakat khususnya pemilih pemula di Kelurahan Sorosutan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diterima oleh peneliti dari pihak ketiga yang sifatnya lebih objektif karena sudah diolah, umumnya dikumpulkan dari hasil penelitian, jurnal, karangan ilmiah, dan monografi setempat.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2015, p. 194).

Didalam penelitian ini penulis mengambil narasumber yaitu sebagai berikut:

Table 1.3
Daftar Narasumber

| No | Narasumber | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1 | Ibu Sri Surani (ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, SDM dan hubungan masyarakat) | 1 |
| 2 | Bapak Rusdianto (ketua divisi sosialisasi dan hubungan masyarakat, PPK Kecamatan Umbul harjo) | 1 |
| 3 | Bapak Suryo Handoko (bagian olah data PPS Kelurahan Sorosutan) | 1 |
| 4 | Pemilih pemula | 10 |

Sumber: data primer yang diolah 2018

b. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya (Arikunto, 2013, p. 201).

1.8.5 Teknik Analisis Data

Telnic analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang dilakukan berdasarkan kemampuan penalaran peneliti dalam menghubungkan fakta-fakta dan informasi yang didapat dengan memahami masalah dan problematika yang muncul di masyarakat.

Menurut (Lexy, 2007) langkah-langkah dalam penggunaan data hingga pengambilan keputusan yaitu:

- a. Mengumpulkan informasi atau data yang berkaitan dengan masalah yang diperoleh dilapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- b. Memeriksa data yang diperoleh dilapangan, yaitu mengadakan pemeriksaan data yang diperoleh dilapangan yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil akhir yang akurat dari data tersebut.
- c. Menyusun klarifikasi informasi dari data yang diperoleh, dimana input ini diperoleh melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan informasi, pemproses data dan dari setiap tahap tersebut dapat mempengaruhi akurasi dan kualitas kesimpulan yang akan didapat nantinya.
- d. Mendeskripsikan dan menganalisis sekaligus menginterpretasikan data. Analisis data didasarkan pada jenis informasi dan kategori laporan penelitian dimana jenis informasinya bisa berupa deskriptif.
- e. Mengambil kesimpulan yaitu, merupakan tahapan paling akhir yang memberikan informasi tentang apa yang telah dilakukan oleh peneliti secara singkat dan padat dari keseluruhan data dan laporan yang telah diperoleh dari penelitian.